



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM

Pathways to Tackle Regional Disparities across the Archipelago

MEMPERKUAT PEMERINTAH DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DR. ASMAN ABNUR, M.Si

Regional Development is a general effort to reduce regional disparities

PERAN PENTING PEMERINTAH DAERAH

1

MENENTUKAN ARAH MASA DEPAN

Pemda memiliki peran untuk menentukan arah kemana tujuan pembangunan akan diwujudkan

2

MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemda memiliki peran untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

3

MENGINISIASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pemda melaksanakan program-program pembangunan untuk membuka akses, memperkuat birokrasi, dan harus hadir dalam setiap kesempatan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan inklusif/pemberdayaan masyarakat

4

MELAKUKAN INOVASI-INOVASI/TEROBOSAN-TEROBOSAN

Pemda memiliki peran untuk mendorong inovasi untuk memberikan solusi permasalahan daerah

MEMPERKUAT PEMERINTAH DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI

FOKUS REFORMASI BIROKRASI

1

AKUNTABILITAS KINERJA

Mendorong pemerintahan berorientasi hasil

2

ZONA INTEGRITAS

Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui unit-unit percontohan

3

SDM ASN

Mendorong penerapan sistem merit untuk mendukung kebutuhan SDM ASN dalam pembangunan daerah

4

KELEMBAGAAN

Memperkuat kelembagaan instansi pemerintah untuk mendukung program pembangunan di daerah

5

PELAYANAN PUBLIK

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Perubahan Pola Pikir/ *Mindset ASN*

- Money follow function → Money follow program
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran
- Pemerintahan lebih berorientasi pada hasil. Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
- Pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin ramah, mudah, murah, cepat, nyaman, aman, dan memiliki kepastian hukum
- ASN menjadi lebih memiliki jiwa kewirausahaan

o u t c o m e

1 MENDORONG PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

EFFECTIVE AND EFFICIENT (AA – B)

72 KEMENTERIAN/
LEMBAGA
29 PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
171 PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

INEFFECTIVE AND INEFFICIENT (CC – D)

10 KEMENTERIAN/
LEMBAGA
5 PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
312 PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

NILAI EFISIENSI DAN DAMPAK YANG DIHASILKAN DARI
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI TAHUN 2017

Rp 41,15 Triliun
(\$2,9 billion)

Rp 5,47 Triliun
dari 7 K/L

Rp 35,68 Triliun
dari 118 Pemerintah Daerah

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi;
4. Perubahan pendekatan: money follow function → money follow program

Diberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang nilai akuntabilitasnya tinggi

2 MENDORONG PENERAPAN E-PERFORMANCE BUDGETING

**PP Nomor 17 Tahun 2017
tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran**

Tahun 2017 telah dilakukan penyelarasan di seluruh Kementerian/Lembaga melalui PP 17/2017 dengan memanfaatkan Aplikasi Krisna. Untuk pemerintah daerah sedang dilakukan pendamping-an penerapan aplikasi SEPAK@T kepada sekitar 21 Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota bersama Kemen PANRB, BPPT, serta BPKP dan akan bertambah lagi sekitar 370 Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PUSAT



Transparant

Web based

Secure

User friendly

Accountable

RUANG LINGKUP

- ✓ Kolaborasi 3 Kementerian (Bappenas, Kemenkeu, KemenPAN RB)
- ✓ KRISNA versi 1.0 diluncurkan pada 17 April 2017
- ✓ Integrasi Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran pada tahap perencanaan, money pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi;
- ✓ Kemudahan implementasi aplikasi bagi pengguna, pengurangan duplikasi proses input dan pengolahan data; kecepatan dan keterandalan data dan informasi.
- ✓ Telah digunakan oleh 87 K/L dan Mitra Kerja K/L di Bappenas dan Kemenkeu sejak tahun 2017 pada proses RKP-Renja-RKA-PK 2018.

PEMERINTAH DAERAH



DAMPAK UTAMA

1. Meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran dan fokus pada sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya keselarasan (program) antara yang direncanakan dengan yang dianggarkan.
3. Setiap sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah terkawal secara jelas pada kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah.
4. Mencegah program/kegiatan "Siluman".

3 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



109

WBK *

18

WBBM **

*) WBK: Wilayah Bebas dari Korupsi

**) WBBM: Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Saat ini telah terdapat 109 unit kerja WBK dan 18 unit kerja WBBM.

Terdiri atas:

- Polres
- Rumah Sakit
- Kantor Pelayanan Pajak
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
- Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Perijinan
- dan lain-lain

Dampak yang diharapkan → Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik



Pembentukan unit kerja percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi



mendorong dampak pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka dibentuk unit-unit pelayanan percontohan



Unit-unit pelayanan percontohan yang berhasil memenuhi kriteria integritas diberikan predikat sebagai unit pelayanan yang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Unit pelayanan percontohan yang tidak hanya memenuhi kriteria integritas tetapi juga kriteria pelayanan yang baik diberi predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)



Tahun 2018, difokuskan di unit-unit penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung)

Sistem Perencanaan yang Tepat Sasaran

- Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah
- Memerhatikan kemampuan keuangan daerah
- Memperhatikan kebutuhan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)

Sistem Rekrutmen yang Efisien dan Transparan:

- Menerapkan sistem pendaftaran secara online
- Menerapkan sistem tes dengan Computer Assisted Test (CAT), yang secara langsung dapat diketahui hasilnya



OUTCOME:

MENGHASILKAN PIMPINAN BIROKRASI (JPT) YANG KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS



PROGRESS PELAKSANAAN PENGISIAN JPT SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

Realisasi:

- 2014 → 40 IP (25 K/L, 6 Prov, 9 Kab/Kota)
- 2015 → 128 IP (48 K/L, 5 Prov, 75 kab/Kota)
- 2016 → 333 IP (77 K/L, 18 Prov, 238 Kab/Kota)
- 2017 → 493 IP (77 K/L, 33 Prov, 383 Kab/Kota)

**pada prinsipnya seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan kompetitif*



PENGEMBANGAN PROFESIONALISME
PEGAWAI



PROMOSI JPT SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF



PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN
KOMPETENSI



REKRUTMEN CALON PNS
TERBAIK



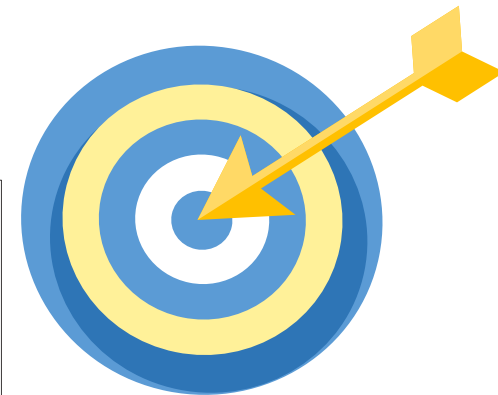
**PENEMPATAN CPNS DARI
SEKOLAH IKATAN DINAS TIDAK
DITEMPATKAN DI DAERAH ASAL**

**IPDN
1.921
orang**

**STTD
111
orang**

**STAN
5.236
orang**

**STIS
440
orang**





LEO KOGOYA
ASAL PAPUA
PENEMPATAN DI JAMBI



M. RISAL SYAUQIE
ASAL KALIMANTAN TIMUR
PENEMPATAN DI PAPUA (KAB. KEEROM)



HAZHIYANA SAHBRINA
ASAL JAWA TIMUR
PENEMPATAN DI KALTARA



BAYU AGIL SAPUTRA
ASAL JAWA TIMUR
PENEMPATAN DI KEP. RIAU (KEP. ANAMBAS)



ANDREA AVELINA
ASAL JAWA TENGAH
PENEMPATAN DI SUMATERA UTARA



LAKSMINTARI PARAMITA
ASAL JAWA TENGAH
PENEMPATAN DI BALI

7 MEMPERKUAT KELEMBAGAAN UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN DAERAH

Pembentukan Kantor Pertanahan

Untuk mewujudkan percepatan pelayanan program Penerbitan sertifikat dan layanan pertanahan

Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama

Untuk mewujudkan percepatan pelayanan hukum kepada masyarakat

Pembentukan Kantor Imigrasi di daerah

Untuk mewujudkan optimalisasi layanan imigrasi di daerah

Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasarakatan

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan lembaga pemasarakatan

Penguatan kelembagan institusi penegakan hukum (Penguatan Polres dan Polda, Penguatan BNN, Badan POM, Penguatan Kejaksaan Negeri, dll)

Untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif untuk mendukung pembangunan daerah

Pembentukan Akademi Komunitas

untuk mempersiapkan SDM dengan keahlian terapan sesuai dengan kebutuhan daerah

Pembentukan Badan Otoritas Kepariwisataaan

(a.l: Badan Otoritas Borobudur, Badan Otoritas Danau Toba, Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Labuan Bajo)

Untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataaan

Pembentukan/penguatan kelembagan Bandara Baru atau pelabuhan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara dan laut

Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA)

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan Agama di daerah

Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Untuk mewujudkan percepatan pelayanan pendidikan tinggi

8 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK



Diberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang nilai inovasinya masuk dalam TOP 40

One Agency
One Inovasi

Kompetisi
Inovasi

Replikasi
Inovasi

Menghasilkan:

- Top 99
- Top 40

PRESTASI INTERNASIONAL (United Nation Public Service Award - UNPSA)

- Kabupaten Aceh Singkil dengan inovasi “Kerja sama Dukun Beranak dengan Bidan pada Saat Melahirkan untuk Menurunkan Tingkat Kematian Ibu dan Anak” (2015, Juara 2)
- Kabupaten Sragen dengan inovasi “UPTPK: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan” (2015, Juara 2)
- Kabupaten Teluk Bintuni dengan inovasi “Pengendalian Malaria Melalui Sistem EDAT” (2018, Juara 1)
- Provinsi Jawa Timur dengan inovasi “Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)” (2018, Finalis)

9 MENGINISIASI PEMBANGUNAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

Mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat



SURABAYA
205
Jenis Pelayanan
• 194 Jenis Pelayanan Daerah
• 11 Jenis Pelayanan Pusat
Diresmikan
6 Oktober 2017



DKI JAKARTA
328
Jenis Pelayanan
• 269 Jenis Pelayanan Daerah
• 59 Jenis Pelayanan Pusat
Diresmikan
12 Oktober 2017



BATAM
427
Jenis Pelayanan
• 406 Jenis Pelayanan Daerah
• 21 Jenis Pelayanan Pusat
Diresmikan
14 Desember 2017

SELANJUTNYA

1. KAB. BELU
2. KAB. BADUNG
3. KAB. BANTUL
4. KAB. BANYUMAS
5. KAB. KULON PROGO
6. KAB. SIDOARJO
7. KAB. MANOKWARI
8. KOTA BANDA ACEH
9. KOTA PAYAKUMBUH
10. KOTA MAKASSAR
11. KOTA MOJOKERTO
12. KOTA PADANG
13. KOTA PALEMBANG
14. KOTA PEKANBARU
15. KOTA SAMARINDA
16. KOTA TANGERANG



DENPASAR
229
Jenis Pelayanan
• 187 Jenis Pelayanan Daerah
• 42 Jenis Pelayanan Pusat
Diresmikan
12 Februari 2018



BANYUWANGI
132
Jenis Pelayanan
• 99 Jenis Pelayanan Daerah
• 33 Jenis Pelayanan Pusat
Diresmikan
6 Oktober 2017



BITUNG
135
Jenis Pelayanan
• 118 Jenis Pelayanan Daerah
• 17 Jenis Pelayanan Pusat
Soft Launching
5 April 2017



BEKASI
29
Jenis Pelayanan
• 17 Jenis Pelayanan Daerah
• 7 Jenis Pelayanan Pusat
• 5 Jenis Pelayanan BUMN/BUMD
Diresmikan
12 Februari 2018



TOMOHON
233
Yang terdiri dari :
• 209 Jenis Pelayanan Daerah
• 10 Jenis Pelayanan Pusat
• 14 Jenis Pelayanan BUMN
Diresmikan
21 April 2018



KARANGASEM
160
JENIS PELAYANAN
• 138 Jenis Pelayanan Daerah
• 11 Jenis Pelayanan Pusat
• 11 Jenis Pelayanan BUMN/BUMD
Diresmikan: **22 Juni 2018**

9 MENGINISIASI PEMBANGUNAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH



MPP DKI Jakarta



MPP Batam



MPP Bekasi



MPP Denpasar



MPP Surabaya



MPP Banyuwangi



MPP Tomohon



MPP Karangasem



MPP Bitung

 **Pengertian**

- Jaringan antar institusi yang mempunyai keinginan bersama membangun inovasi pelayanan publik
- Permenpan No 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

 **Stakeholder**

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Universitas Negeri dan Swasta, Organisasi Non Pemerintah serta Mitra Pembangunan

Mengapa itu sangat penting?

- ❖ Sebagai ajang *Transfer of Knowledge*
- ❖ Bagi yang sudah melaksanakan inovasi kepada yang akan melaksanakan inovasi
- ❖ Untuk menginformasikan kepada pimpinan daerah, pelayanan publik dan masyarakat tentang progres dalam pelayanan publik
- ❖ Untuk fasilitasi antara masyarakat dan penyedia pelayanan publik agar mereka dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan inovasi pelayanan publik yang ada

Hub Inovasi yang telah terbentuk:

1. Hub Jawa Timur
2. Hub Sumatera Selatan
3. Hub Sulawesi Selatan

Langkah Konkret:

1. Sebagai pusat pembelajaran untuk wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur
2. Pengembangan jaringan informasi inovasi pelayanan publik
3. Pelaksanaan bimbingan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota setempat sebagai Model Pengelolaan Inovasi

11 PENYELENGGARAAN THE INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE FORUM 2018

IPS Forum merupakan platform komunikasi dan interaksi bagi para pemimpin dan pengelola pelayanan publik untuk menciptakan, memperluas dan menggerakkan partisipasi publik.

TUJUAN

1. Memberikan inspirasi kepada dunia atas inovasi-inovasi pelayanan publik di Indonesia
2. Wahana pembelajaran interaktif antarnegara dan intranegara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik
3. Meningkatkan kerjasama antara negara dalam percepatan reformasi birokrasi, pertukaran pengetahuan dan penguatan kepemimpinan di bidang pelayanan publik
4. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor

Tema:

Expanding and Improving Service Delivery through Public Engagement

Rangkaian Acara:

- Pameran Inovasi Pelayanan Publik dari 100-150 innovator dari dalam dan luar negeri.
- Seminar dengan Pembicara berasal dari luar negeri dan dalam negeri baik dari kalangan pemerintah, donor, organisasi masyarakat sipil, *entrepreneur*, peneliti, dan akademisi.

Peserta:

1. Para pemimpin setingkat menteri
2. Gubernur, bupati, dan walikota
3. Perwakilan dari mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, kementerian/lembaga, dan pengusaha
4. Masyarakat Umum
5. Media

Diperkirakan sebanyak 5.000-10.000 orang
menghadiri IPS Forum

7 – 8 November 2018
JCC Senayan, Jakarta

**KEBERHASILAN
PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERLETAK PADA
PIMPINAN DAERAH**



TERIMA KASIH



ASIAN GAMES | 2018
Jakarta Palembang

